

**PENGARUH UPAH DAN INVESTASI TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KOTA DI PROVINSI BALI**

Alldy Jaya Nugraha Sebo¹

I Wayan Sukadana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan mengamanatkan program pembangunan yang mendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, menghilangkan kesenjangan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel sebanyak 63 data dari tahun 2015-2021 di 9 kabupaten/kota di Bali, metode pengumpulan data secara observasi non partisipan dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali. Upah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali. Ketimpangan pendapatan tidak memediasi pengaruh upah dan investasi terhadap kesejahteraan

Kata kunci: *upah, investasi, ketimpangan, kesejahteraan.*

ABSTRACT

Equitable and equitable economic development mandates development programs that encourage increased regional economic growth, eliminate inequality and can improve community welfare in a sustainable manner. This study aims to determine the effect of wages and investment on income inequality and the welfare of the district/city community in Bali Province. The source of the data used in this study is panel data of 63 data from 2015-2021 in 9 districts/cities in Bali, the method of collecting data is non-participant observation by observing documents related to the research. The data analysis technique used is path analysis technique. The results show that wages have a negative and significant effect on income inequality, while investment has a positive and significant effect on income inequality in the districts/cities of Bali Province. Wages and investment have a positive and significant effect on people's welfare, while income inequality has a positive but not significant effect on people's welfare in the districts/cities of Bali Province. Income inequality does not mediate the effect of wages and investment on welfare

Keywords: wages, investment, inequality, welfare.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi memiliki beberapa tujuan diantaranya meningkatkan standar hidup setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2016). Permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh negara yang sedang tahap berkembang seperti Indonesia adalah rendahnya pembangunan manusia yang mengarah kepada kesejahteraan serta kesenjangan ekonomi atau terjadinya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Tambunan, 2001).

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali (Pratama, 2019). Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi di dalam masyarakat, perbedaan potensi yang dimiliki setiap daerah mempengaruhi pendapatan yang dapat dihasilkan setiap daerah sehingga antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal (*capital stock*) akan memperoleh

pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya (Mustika, 2013). Pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkatkan persediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia (Dar dan Asif, 2018). Tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tingginya pembangunan manusia. Proses pembangunan meliputi segala aspek tidak hanya dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia pun harus diperhatikan secara serius dikarenakan sumber daya manusia ini yang akan menjadi subjek artinya pelaku kegiatan ekonomi dan objek ekonomi suatu daerah. Pembangunan manusia yang baik dan berkualitas menentukan kualitas SDM, baik kaitannya dengan kelembagaan serta teknologi dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu negara. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2021 (dalam poin)

| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Manusia | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kab. Jembrana | 69.66 | 70.38 | 70.72 | 71.65 | 72.35 | 72.36 | 72.75 |
| Kab. Tabanan | 73.54 | 74.19 | 74.86 | 75.45 | 76.16 | 76.17 | 76.45 |
| Kab. Badung | 78.86 | 79.80 | 80.54 | 80.87 | 81.59 | 81.60 | 81.83 |
| Kab. Gianyar | 75.03 | 75.70 | 76.09 | 76.61 | 77.14 | 77.36 | 77,70 |
| Kab. Klungkung | 68.98 | 69.31 | 70.13 | 70.90 | 71.71 | 71.73 | 71.75 |
| Kab. Bangli | 66.24 | 67.03 | 68.24 | 68.96 | 69.35 | 69.36 | 69,37 |
| Kab. Karangasem | 64.68 | 65.23 | 65.57 | 66.49 | 67.34 | 67.35 | 67.36 |
| Kab. Buleleng | 70.03 | 70.65 | 71.11 | 71.70 | 72.30 | 72.55 | 72.56 |
| Kota Denpasar | 82.24 | 82.58 | 83.01 | 83.30 | 83.68 | 83.93 | 84.03 |
| Provinsi Bali | 73.27 | 73.65 | 74.30 | 74.77 | 75.38 | 75.50 | 75.69 |

Sumber: *BPS Statistik Bali, 2022*

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa IPM dalam 7 tahun terakhir Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan namun rata-rata pertumbuhannya cenderung rendah atau masih di bawah angka 1 persen setiap tahunnya. Pada tabel menunjukkan Kabupaten Karangasem memiliki angka indeks pembangunan manusia terendah pada tahun 2015 dengan angka 64.68 dari keseluruhan wilayah yang ada. Kabupaten Denpasar memiliki angka indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2021 dengan angka 84.03 dari keseluruhan wilayah yang ada dalam 7 tahun terakhir. Masih terdapat 5 kota pada tahun 2015-2021 yang memiliki indeks pembangunan manusia dibawah rata rata indeks provinsi.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata terdapat daerah dengan pembangunan yang cepat dan daerah dengan pembangunan yang lambat, dimana ketidakmerataan pembangunan akan

berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Hariwan dan Swaningrum, 2015). Ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Selain memberikan dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004:235). Selain itu, ketimpangan antar wilayah akan mengakibatkan migrasi penduduk yang bekerja dan berpindahnya modal dari daerah yang tertinggal menuju daerah yang maju (Sudibia et al, 2015).

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Investasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena merupakan salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Apabila penemuan-penemuan baru atau pembebanan pajak yang ringan atau pasar-pasar yang semakin berkembang memberikan insentif bagi investasi-investasi yang ada yang membuat permintaan agregat meningkat sementara output dan kesempatan

kerja tumbuh dengan cepat (Fahme, 2013). Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Sulistiawati, 2012). Investasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan perekonomian di masa yang akan datang, dengan meningkatnya tingkat investasi hal itu akan mendorong semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja yang ada di daerah.

Investasi pada suatu wilayah akan membawa dampak *multiflier effect* bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi wilayah, dengan adanya investasi terdapat beberapa hal yang diuntungkan seperti terbukanya lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, serta dapat memajukan wilayah melalui penggalian potensi ekonomi wilayah yang semakin terkelola dengan baik. Investasi yang ada pada suatu wilayah akan membawa dampak yang baik untuk kemajuan apabila investasi tersebut mampu berlangsung dalam jangka panjang dan memberikan daya ungkit yang optimal bagi perekonomian wilayah sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Namun, investasi akan berdampak buruk dan memberikan daya ungkit yang lemah, apabila investasi itu tidak berjalan dalam jangka panjang serta banyak menimbulkan

permasalahan sosial dan lingkungan bagi wilayah sekitar. Menurut Krismajaya dan Dewi (2019) investasi akan memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan apabila mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan ini akan dapat tercapai apabila investasi dapat merata disegala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya yang mendukung pemerataan dan kemajuan ekonomi wilayah.

Menurut Danawati dkk.,(2016), bagi masyarakat umum, keberhasilan menarik investasi akan berdampak baik bagi penyerapan lapangan kerja dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii, 2009). Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Sayekti (2009), kebijakan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi investasi belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota tetap akan terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan.

Penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan dari meningkatnya tingkat investasi akan meningkatkan pendapatan upah masyarakat daerah, yang kemudian memberikan dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bagi pihak pekerja, tinggi rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat. Upah yang dimaksud disini adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya (Boockmann, 2010), balas jasa atas prestasi kerja ini harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga secara layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 8/1981 tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dinyatakan nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Kurniawan dan Sulistyaningrum, 2017).

Pendapatan masyarakat secara formal sebagian besar didapat dari upah dari tempat ia bekerja, dan terdapat istilah upah minimum, adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Batas standar upah minimum Kabupaten/Kota akan mempengaruhi jumlah orang untuk masuk kedalam

pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum kabupaten/kota memiliki tujuan agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak sebagai balas jasa tenaga kerja yang diberikan kepada pihak yang menggunakan (Borgan, 2018 dalam Samuelson, 2001). Tujuan dari ditetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah (Sofiyana.2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel upah, investasi, ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/ kota di provinsi Bali. Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan kota Denpasar, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian antara kabupaten/kota dikarenakan penulis melihat masih terjadinya rata-rata pertumbuhan IPM kabupaten/kota di provinsi Bali yang cenderung masih di bawah 1 persen dan masih terdapat 5 kota pada tahun 2015-2021 yang memiliki indeks pembangunan manusia dibawah rata rata indeks provinsi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y2). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan (Y1). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah upah (X1) dan investasi (X2). Titik pengamatan dalam penelitian ini ada di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2015 hingga 2021 (7

tahun) maka besarnya ukuran sampel adalah $9 \times 7 = 63$ pengamatan dengan mengkombinasikan data panel *time series/cross section*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *observasi nonparticipant*.

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Suyana Utama, 2016: 156). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Struktur I

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (2)$$

Struktur II

$$Y_2 = \alpha + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Y_1 | = ketimpangan pendapatan |
| Y_2 | = kesejahteraan masyarakat |
| α | = konstanta |
| X_1 | = upah |
| X_2 | = investasi |
| e_1, e_2 | = error |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ | = koefisien regresi untuk masing-masing variabel |

Nilai kekeliruan taksiran standard (*standar error of estimate*) yakni:

$$e = \sqrt{1 - R^2} \dots\dots\dots (3)$$

Koefisien jalur adalah *standardized* koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan regresi yaitu menunjukkan

hubungan yang dihipotesiskan. Total keraguan yang dapat dijelaskan oleh model, diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - P_{e1}^2 - P_{e2}^2 \dots \dots P_e^2 \dots \dots \dots (4)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap R_m^2 dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi ei yang merupakan *standard of error estimate* dari model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh Upah dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | .622 | .126 | | 4.944 | .000 |
| | Upah | -.025 | .008 | -.355 | -3.182 | .002 |
| | Investasi | .006 | .002 | .344 | 3.079 | .003 |

a. Dependent Variable: Ketimpangan Pendapatan R2 = 0.314
F = 13.724 ; F sig. = 0.000

Sumber: *Data Diolah, 2022*

Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh Upah, Investasi, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | -62.354 | 27.729 | | -2.249 | .028 |
| | Upah | 7.272 | 1.599 | .535 | 4.548 | .000 |
| | Investasi | 1.354 | .366 | .433 | 3.696 | .000 |
| | Ketimpangan Pendapatan | 36.661 | 23.999 | .192 | 1.528 | .132 |

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Coefficients | | |
| 1 | (Constant) | -62.354 | 27.729 | | -2.249 | .028 |
| | Upah | 7.272 | 1.599 | .535 | 4.548 | .000 |
| | Investasi | 1.354 | .366 | .433 | 3.696 | .000 |
| | Ketimpangan Pendapatan | 36.661 | 23.999 | .192 | 1.528 | .132 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat, R = 0.359

F = 11.006 ; F sig. = 0.000

Sumber: *Data Diolah, 2022*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Suyana, 2016: 159). Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam persamaan struktural, yaitu:

$$\text{Persamaan Struktural 1: } Y_1 = -0.355 X_1 + 0.344 X_2 + e_1$$

$$\text{Persamaan Struktural 2: } Y_2 = 0.535 X_1 + 0.433 X_2 + 0.192 Y_1 + e_2$$

Nilai kekeliruan taksiran standar untuk variabel independen jumlah upah (X_1) dan investasi (X_2) terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan (Y_1). Adapun nilai kekeliruan taksiran standarnya yaitu sebagai berikut:

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0.314}$$

$$e_1 = 0.828$$

Sedangkan Nilai kekeliruan taksiran standar untuk kesejahteraan masyarakat (Y_2)

) menunjukkan jumlah varian ketimpangan pendapatan yang tidak dijelaskan oleh variabel independen jumlah upah (X_1), investasi (X_2), dan ketimpangan pendapatan (Y_1). Adapun nilai kekeliruan taksiran standar

yaitu: $\sqrt{\quad}$

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0.359}$$

$$e_2 = 0.801$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - e_1^2 \cdot e_2^2 \\ &= 1 - (0.828)^2 (0.801)^2 \\ &= 1 - (0.686) (0.641) \\ &= 1 - 0.439 \\ &= 0.561 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0.561 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 56,1 persen yang dapat dijelaskan oleh model, dan sisanya sebesar 43,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa upah (X_1) dengan nilai t statistic sebesar -3.182 dan nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0,05$, ini berarti bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa ketika upah yang diterima oleh masyarakat meningkat dari kegiatan usaha atau bekerja yang dilakukannya, maka hal ini juga akan berdampak bagi penurunan ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat. Peningkatan upah/pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat positif karena hal tersebut akan dapat membangkitkan posisi ekonomi yang ada seperti meningkatnya daya beli masyarakat terhadap konsumsi suatu produk barang atau jasa, meningkatnya tabungan dan juga investasi, sehingga hal tersebut akan dapat menggeliatkan kondisi perekonomian wilayah dan secara langsung akan dapat mengurangi kesenjangan atau ketimpangan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Menurut penelitian Noviana (2020) yang menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini berarti bahwa apabila pola pembangunan suatu wilayah telah mampu berjalan secara inklusif dalam mendukung peningkatan kesempatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hal tersebut akan berdampak terhadap semakin rendahnya ketimpangan pendapatan yang ada. Hal senada juga diungkapkan oleh

penelitian Sanjaya dan Saskara (2020) yang menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu penelitian Rohman dan Prani (2021) yang juga menyatakan bahwa peningkatan upah yang diterima akan berdampak bagi penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu wilayah. Hal ini berarti bahwa apabila peningkatan upah dari aktifitas kegiatan ekonomi yang dijalankan penduduk akan membawa dampak yang baik terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, pembangunan wilayah yang inklusif dan berkesinambungan ini sangat diperlukan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dari sisi penerimaan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup serta menekan dampak terjadinya pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa investasi (X_2) dengan nilai t statistic sebesar 3.079 nilai signifikansi sebesar $0.003 < 0,05$, ini berarti bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa ketika investasi mengalami peningkatan hanya di beberapa sektor dan di beberapa wilayah kabupaten/kota hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat. Hal tersebut disadari bahwa adanya investasi hanya di beberapa sub sektor yang ada hal tersebut akan membawa dampak bagi tertinggalnya sub sektor lain karena kurangnya ada investasi untuk membangkitkan sub sektor lainnya, sehingga

hal tersebut yang membawa dampak kesenjangan ekonomi bagi sebagian masyarakat khususnya dari sisi pendapatan yang dihasilkan.

Selain itu aglomerasi investasi yang hanya berpusat di beberapa wilayah kabupaten/kota atau hanya terdapat di wilayah kota saja akan membawa dampak pula bagi ketimpangan pendapatan yang akan dihasilkan oleh masyarakat yang ada di wilayah kota dan juga perdesaan. Penelitian Sanjaya dan Saskara (2020) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini berarti bahwa apabila penanaman modal dalam bentuk investasi dalam jangka pendek akan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, namun karena kurangnya keberlanjutan dalam jangka waktu yang panjang maka investasi akan dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan penelitian Danawati dkk.,(2016) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Wahyuni dkk.,(2014) menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Penelitian Efendi dan Sjamsu (2021) investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri ataupun asing dalam jangka waktu panjang secara berkelanjutan sangatlah penting dalam menjaga distribusi pendapatan yang merata dan bersinambungan, selain itu pemerataan investasi di wilayah desa dan kota yang disesuaikan

dengan potensi ekonomi yang ada sangatlah penting dalam membangun perekonomian yang merata dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa upah (X_1) dengan nilai t statistic sebesar 4.584 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, ini berarti bahwa upah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Artinya bahwa ketika upah/pendapatan yang dimiliki seseorang meningkat, maka akan berpengaruh bagi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan upah akan berdampak bagi peningkatan konsumsi yang dilakukan masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya, terpenuhinya kebutuhan hidup dari peningkatan upah/pendapatan yang dimiliki masyarakat maka akan mendukung peningkatan kesejahteraan yang dirasakannya.

Menurut penelitian Mahendra dan Arka (2020), upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Batara dan Badriyah (2017) yang menyatakan bahwa upah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu bentuk perasaan subyektif yang dirasakan oleh masyarakat dari terpenuhinya akan segala bentuk kebutuhan hidup yang layak, mulai dari perumahan, kesehatan dan juga pendidikan. Kesejahteraan tersebut dapat tercapai apabila masyarakat dapat aktif dan produktif secara ekonomi dalam

menghasilkan upah/pendapatan yang dipergunakan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidupnya, dengan adanya upah/pendapatan masyarakat akan dapat lebih meningkatkan kemampuan untuk membeli dan juga menambah konsumsi akan barang/jasa yang diperlukan, sehingga terpenuhinya akan kebutuhan hidupnya tersebut, masyarakat akan dapat merasakan tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang subyektif dari hidupnya.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa investasi (X_2) dengan nilai t statistic sebesar 3.696 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, ini berarti bahwa investasi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa apabila investasi dalam bentuk penanaman modal pada suatu wilayah terus dilakukan dalam jangka panjang, maka akan dapat membangkitkan perekonomian wilayah dan berdampak bagi kesejahteraan penduduknya.

Menurut penelitian Sulistyawati (2012) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Krismajaya dan Dewi (2019) investasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Serta penelitian Nisa dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa penanaman modal (investasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Adanya investasi pada suatu wilayah akan memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan

wilayah seperti terwujudnya sub sektor baru, terciptanya kesempatan kerja yang semakin luas sehingga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin baik oleh masyarakat, maka akan dapat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan (Y_1) dengan nilai t statistic sebesar 1.528 dan nilai signifikansi sebesar $0,132 > 0,05$, ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan (Y_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan, maka akan berdampak bagi penurunan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Menurut penelitian Sanjaya dan Saskara (2020) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan apabila dalam jangka pendek dan hanya terjadi di beberapa bagian dan kelompok masyarakat kecil maka dampaknya akan relatif kecil yang hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat, namun apabila kondisi ketimpangan ini berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terjadinya kesenjangan yang luas antara wilayah desa dan kota maka ini akan berdampak bagi penurunan kesejahteraan masyarakat.

Pada suatu perekonomian wilayah ketimpangan dapat saja terjadi karena perbedaan sumber daya alam atau potensi wilayah dan perbedaan

kondisi demografi pada masing-masing wilayah. Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup layak yang relatif dirasakan oleh masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan potensi sumber daya wilayah. Penelitian Simon Kuznet yang menyatakan bahwa ketimpangan berbentuk pola seperti huruf U terbalik terkait dengan kesenjangan antar wilayah. Pola tersebut menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Hartono, 2008).

Pengujian Ketimpangan Pendapatan Sebagai Variabel Mediasi Pengaruh Upah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Oleh karena nilai z hitung sebesar $-1.37 < z$ tabel sebesar 1,96, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa ketimpangan pendapatan tidak memediasi pengaruh upah terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan tidak berdampak signifikan terhadap upah yang dimiliki masyarakat dalam mencapai tingkat kesejahteraannya. Upah yang dimiliki masyarakat akan memberikan pengaruh yang baik bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dengan adanya pemerataan tingkat upah yang dihasilkan masyarakat akan dapat menekan tingkat ketimpangan distribusi upah/pendapatan dikabupaten/kota yang ada, karena semakin baiknya aktivitas ekonomi yang dilaksanakan

oleh masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang subyektif dirasakan oleh masyarakat, ketika terjadinya peningkatan upah maka akan berdampak baik terhadap kesejahteraan yang dirasakan masyarakat karena kebutuhan hidup akan sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikannya dapat terpenuhi dengan baik dan layak.

Pengujian Ketimpangan Pendapatan Sebagai Variabel Mediasi Pengaruh Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Oleh karena nilai z hitung sebesar $1.36 < z$ tabel sebesar 1,96, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa ketimpangan pendapatan tidak memediasi pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Artinya bahwa ketimpangan pendapatan tidak berdampak signifikan terhadap pengaruh investasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi dalam jangka Panjang akan berpengaruh baik terhadap penyerapan lapangan pekerjaan dan berdampak bagi perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya berdampak bagi peningkatan pendapatan yang dihasilkan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini akan memberikan pengaruh bagi kemampuan konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian tingkat kesejahteraannya. Investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing akan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan secara berkelanjutan dan merata baik

diwilayah perdesaan dan wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan akan berdampak kecil dalam perekonomian wilayah.

SIMPULAN

- 1) Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Upah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Ketimpangan pendapatan tidak memediasi pengaruh upah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali.

SARAN

- 1) Bagi pemerintah, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, evaluasi dan perumusan kebijakan-kebijakan kedepannya untuk dapat memperkecil ketimpangan yang ada di tiap wilayah kabupaten/kota yang ada di Bali. Kebijakan pembangunan manusia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga nantinya sumber daya manusia kita dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses pembangunan. Semua

stakeholder yang ada di rumah tangga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan penguatan kebijakan yang nantinya dapat mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai contoh dilihat dari cara mengelola, strategi dan manajemen serta kebijakan suatu kegiatan pembangunan ekonomi secara inklusif, merata, dan berkeadilan.

- 2) Bagi masyarakat semoga penelitian ini dapat menjadi cerminan kedepannya untuk dapat semakin proaktif dan produktif dalam pembangunan manusia, melalui upaya program-program/kebijakan yang disediakan oleh pemerintah seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulus bantuan permodalan usaha, serta kebijakan lainnya yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat, kesadaran serta semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan dari generasi muda yang merupakan agen pembangunan bagi bangsa ini untuk ikut serta dalam memajukan perekonomian wilayah.

REFRENSI

Amanaturrohim, Hanifah dan Widodo, Joko. 2016. Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi Di Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung. *Economic Education Analysis Journal*. Vol 5 (2) (2016).

Arthur H. Goldsmith, Jonathan R. Veuma & William Darity, Jr. (2018). The Impact of Psychological and Human Capital on Wage. *Western Economic Association International*, Vol. Xxxv, 815-829, (Issn 0095-2583).

- Batara, Surya Agung ., dan Nurul Badriyah. 2017. Analisis Pengaruh Upah Dan Jaminan Sosial Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja (Studi Pada Pabrik Gula (Pg) Kebon Agung Malang). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Craig David, Porter Doug. 2003. *Poverty Reduction Strategy Papers: A New Convergence*. World Development Vol. 31, No. 1.
- Christian Dustmann, Najma Rajah & Arthur Van Soes. (2002). Class Size, Education and Wages. *IZA Discussion Paper*. No. 501.
- Dar, J. A., And Asif, M. (2018). Does Financial Development Improve Environmental Quality In Turkey? An Application Of Endogenous Structural Breaks Based Cointegration Approach. *Management Of Environmental Quality: An International Journal*, 29(2): 368–384.61
- Dwi Setyadhi Mustika Made.2013. *Analisis Disparitas Pendapatan Pedagang Makanan Gerobak Dorong Antar Kecamatan Di Kota Denpasar*. PIRAMIDA Vol. Ix No. 2 : 89 – 94.
- Fleisher Belton, Haizheng Li, Dan Qiang Zhao.2009. *Human Capital, Economic Growth, And Regional Inequality In China*, *Journal Of Development Economics, Departement Of Economics, Ohio State University, Columbus Oh 43210, United States*. No 17.
- Ghofar Purbaya, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya”, (OECONOMICUS Journal Of Economics), Volume 1, No. 1, Des 2016, h.76
- Hariwan Peggy & Swaningrum Ayu. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 72-82. ISSN: 2301-8968.

- Irawan Andi, 2015. *Regional Income Disparities In Indonesia: Measurements, Convergence Process, And Decentralisation. Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. Issn: 0007-4918.
- Kaur, Manjinder dan Singh Lakhwinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *African Journal of Science, Technology, Innovation, and Development*, 8(2): 205-212.
- Kukathas, C. Dan Pettit, P., *Rawls 1990: A Theory Of Justice And Its Critics* (Oxford, Polity).
- Kurniawan Septyono & Sulistyaningrum Eny. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2 Agustus 2017: 193-215 PIISSN: 2301 - 8968 EISSN: 2303 – 0186.
- Krismajaya, I. Putu, and Ni Putu Martini Dewi. "Pengaruh belanja daerah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Bali." *E-Jurnal EP Umd* 8.6 (2019).
- Mahendra, Kadek Bagus Siwa Nata., dan Sudarsana Arka. 2020. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal EP Unud*, 10 [1].
- Matt Dickson. (2009). The Causal Effect of Education on Wages Revisited. *IZA Discussion Paper*. No. 4419, Institute for the Study of Labor (IZA).
- Maratade, Siske Yanti. 2016. —Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Tahun 2002-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(1).
- Midgley, James And Amy Conley. 2000. *Social Work And Social Development*. Oxford University Press.
- Mudiarcana, Gede Navo dan Marhaeni, A.A.I.N. 2018. Analisis Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga

Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7 [6] : 1112-1139. ISSN : 2303-0178

Niyimbanira Ferdinand, 2017, *Analysis Of The Impact Of Economic Growth On Income Inequality And Poverty In South Africa: The Case Of Mpumalanga Province*. Issn: 2146-4138.

Nisa, An., dan Herniwati Retno Handayani. 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Journal Of Economics Diponogoro*. Volume 10, Nomor 1.

Noviana, Siti Nurul. 2020. Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Rasio Infrastruktur Terhadap kesenjangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol 1, No 2.

Novita Dewi. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekon*. Vol.4 No.1.

Oka Artana Yasa I Komang & Arka Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 63 – 71. ISSN: 2301-8968.

Panca Kurniasih Erni, 2017, *Effect Of Economic Growth On Income Inequality, Labor Absorption, And Welfare*. Vol 9. No 2, Hal 181-188.

Patryano G. Anggara, M. Fitri Rahmadana & Indra Maipita. (2017). The Influence of Economic Growth, Number of Students in Vocational Secondary School and Unemployment Rate to Poverty Rate in North Sumatera Provinc. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Volume 104.

Pratama, Gede Krisna dan Darsana, Ida Bagus. 2019. Pengaruh Kemiskinan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 [6]

Putra, Grahadika IGANB, et all. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Langsung dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota

Provinsi Bali. Tesis. Program Magister Ilmu Ekonomi. Program Pascasarjana FEB Unud.

- Rawls, John Justice (1985). As Fairness Political Not Metapysical. _
Philosophy And Public Affairs 14
- Sulistiawati & Rini. (2012). Pengaruh Upah Minimum Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Social*. Volume 8. Nomor 3, Hal: 195-211.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* . Vol. 3, No. 1.
- Simona Ferraro, Birgit Hänilane & Karsten Staehr. (2018). Minimum Wages and Employment Retention: A Microeconomic Study for Estonia. *Baltic Journal of Economics*. Vol. 18, No. 1, 51–67. ISSN: 1406-099X.
- Taufik, Muhammad; Rochaida, Eny; Fitriadi, Fitriadi. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015.
- Tutik Yuliani & Novita Saragih. (2014). Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics and Policy*. 60-72, ISSN 1979-715.
- Toth Russell, 2013. *The Dynamics of Entrepreneurial Human Capital*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. ISSN: 0007-4918
- Thomas Pikett . 2014. *Capital in the 21st Century* Arthur Goldhammer The Belknap Press of Harvard University Press
- Wahyuni, I Gusti Ayu Putri., Made Sukarsa., dan Nyoman Yuliarmi. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 3.(8).

Wildan Syafitri. (2013). Determinants of Labour Migration Decisions: The Case of East Java, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 49:3, 385-386, DOI:10.1080/00074918.2013.850638.